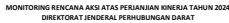




BILAN, IANILARI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 1		REALISASI BULAN 1		CAPAIAN BULAN 1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
								VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%				VOLUME	%		
1	SP1 Meningkatkan Kinerja Transportasi Nasional	KP 1 Rasio Kinerja Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN - Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN - Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN - Subsidi Angkutan Jalan Perintis - Trayek ARAP yang dilayani - Monitoring dan Tindakan Pelaksanaan Keperluan Angkutan Jalan - Survey Usulan Trayek Baru Keperluan Angkutan Jalan - Subsidi Perawatan Bus The Service - Terminal Tipe A : (Pembangunan + Operasional) Putat + Baital - Asapin (Putat + Baital) SUNGAL DANAU & PEMBEREBARAN - Perencanaan (Pembangunan Bus, Layanan dan Rehabilitasi) - Subsidi Angkutan Pemberiban Perintis - Rehabilitasi Kapal Penyerbangan ke Boleng - Subsidi Ribu Long Distance Ferry Perintis - Banjarmasin dan Patinban - Pontianak	Rasio Kinerja Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp	2.654.181.480.100	100%	0,957	Rp	250.377.611.093	101,36%	9,43%	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan penamtan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan ARAP dan trayek angkutan ALBN • Pengembangan trayek ALBN tergantung pada perjanjian kerjasama antara dua negara • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berada di depan dengan Indonesia • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas. • Pelayanan trayek keperluan angkutan jalan saat ini berdasarkan kondisi dan Pemertintah Daerah dimana lokasi yang di sukukan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum lalu, namun belum mengkonstruksi daerah IT (Terdapan, Terlayani, Tertinggal) • Pelayanan keperluan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (Seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui. • Terbatasnya aksesibilitas dan transportasi angkutan transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke layanan angkutan antarmoda KPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut; • Adanya resident dari angkutan umum yang di elawad angkutan antarmoda; • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda • Tingginya harga tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya wisatawan domestik dari luar provinsi; • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KPN. • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator; • Dit. Prasarana TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Pemungut Tipe A yang	• Dit. Angkutan Jalan • Mulai tahun anggaran 2022, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN; • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan informasi pelayanan angkutan KSPN; • Melakukan penamtan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelayanan angkutan antarmoda KSPN; • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan penamtan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpasut. • Penguatan koordinasi terhadap pihak lain, agar dapat berkoordinasi dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan survey usulan trayek baru keperluan angkutan jalan sebelum penetapan jaringan trayek keperluan; • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdan No. KP 01RD 030 Tahun 2022, dan • Berkoordinasi dengan Badan Penempatan, Selangit Hubdan terkait pengawasan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DAMAI. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	• Dit. AI • Dit. PTI • Dit. TSDP
		KP 5 Rasio Kinerja Transportasi Perkotaan	rasio	0,636	- Subsidi Perawatan Bus The Service - Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service - Regulasi Sewa Perangtapi Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekomendasi Data Pembayaran Tarif Layanan Bus The Service - Pemadangan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan	Rasio Kinerja Transportasi Perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp	535.934.071.000	100%	0,636	Rp	56.872.885.229	100,00%	10,61%	• Pelaksanaan konsolidasi untuk membahas rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema buy the service; • Mengupayakan usulan tarif layanan BTP masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat volutif; • Pemecatan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana; • Komitmen antara Pemertintah Pusat dan Pemertintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemertintah Daerah dan masyarakat; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara reguler; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Bus The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	Dit. AI	
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	KP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Digen Hubdan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp	133.773.000	100%	95,143	Rp	-	101,15%	0,00%	• Masih didapat pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik • Masih banyak didapat pengguna jasa yang belum memiliki handphone/gadget • Masih belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Survey Kepuasan Masyarakat	• Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; • Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemertintah PT terkait. • Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi SA-WAP-IPN kepada seluruh petugas pelaksana SDM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SSM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SSM • Tindak lanjut atas hasil evaluasi yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SSM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AIR SGP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan; • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perantara Direktorat Transportasi SDP	Bagian SDM dan Umum, selangit hubdan
		KP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	81,513	- Pengawasan Pelaksanaan dan Pemertintaan kegiatan Incidentil Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyelenggaraan Lintas Antar Provinsi - Perencanaan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyelenggaraan Baru	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	81,513	81,513	100%	Rp	275.000.000	100%	81,513	Rp	84.321.718	100,02%	30,86%	• Pelaksanaan online ticketing angkutan penyelenggaraan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan Mirak, Pelabuhan Penyelenggaraan Bakahean, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelumpang dan Pelabuhan Penyelenggaraan Mirak, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelumpang dan Pelabuhan Penyelenggaraan Gilimukun tetapi belum diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyelenggaraan Secara Elektronik; • Pada beberapa lintas terkendala karena umur alat alyanaran sehingga pemeliharaan waktu lebih lama akan sandar; • Pada beberapa lintas kekurangan fasilitas dermaga sementara jumlah kapalnya banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat; • Adanya keterlambatan pelayanan yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi teknis atau cuaca	• Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyelenggaraan; • Pelaksanaan online ticketing angkutan penyelenggaraan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan Mirak, Pelabuhan Penyelenggaraan Bakahean, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelumpang dan Pelabuhan Penyelenggaraan Gilimukun tetapi belum diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyelenggaraan Secara Elektronik; • Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyelenggaraan dan ketepatan jadwal di lapangan; • Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan; • Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal di lapangan; • Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.	Dit. TSDP
		KP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	%	81,655	- Subsidi Perawatan Bus The Service - Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service - Regulasi Sewa Perangtapi Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekomendasi Data Pembayaran Tarif Layanan Bus The Service - Pemadangan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotaan	81,655	81,655	100%	Rp	535.934.071.000	100%	40,086	Rp	56.872.885.229	145,80%	10,61%	• Adanya migrasi teknologi dari Teman Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyelesaian komponen teknologi yang ada • Belum terdapatnya antara layanan angkutan umum perkotaan Buy The Service sebagai Trunk Line (Trayek Utama dengan Pengemudi (Feeder) seperti dan sebagai lala lintas untuk pemertintaan kecapaian bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu; • Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi On Time performance; • Melakukan inspeksi evaluasi efektifitas pengurusan manajemen dan respons lalu lintas dan hal terkait lainnya	Dit. AI	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET ANGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGARAN	% CAPAIAN BULAN 1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
												CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGARAN							
3	SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	rasio	0,008	• Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan • Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Pelajar Pemeriksa BMF Ranzing Bangun Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Perusahaan Karsen/ Kendaraan Bermotor • Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lelaban Notal dan Tahun Baru (Rampcheck) • Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang • Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum • Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) • Program Aksi Keselamatan Berkendara • Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan • Forum LLA Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000.000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	• Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 167 perusahaan yang memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.657 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), Hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting; • Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; • Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keselamatan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah at cost bagi perusahaan itu sendiri; • Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas.	• Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; • Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; • Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK; • Melakukan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); • Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan • Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat; • Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik ASAP/Parhelata maupun Angkutan Barang Khusus (BB); • Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan); • Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; • Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; • Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; • Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum ASAP/Parhelata maupun Angkutan Barang (BB); • Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan ditetapkannya dengan sistem informasi peraturan angkutan umum (e-PONAM)	Dr. Sarana T?
		RP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	• Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengkalan Hukum Bidang TSP • Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000.000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%	2,88%	• Sumber Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan marine inspektur sungi danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LUKAP, dll; • Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengkrola Transportasi Darat dan KSDP Danau Tobas; • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; • Regulasi di bidang keselamatan TSP yang sudah mengalami peningkatan pematian	• Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesejahteraan angkutan umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; • Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; • Berkordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca; • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi inspeksi keselamatan transportasi Penyeberangan (Ramp Check) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan); • Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas; • Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas; • Pembinaan Barisan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas; • Penunasan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengawasan; • Penyusunan Kebijakan terkait kompetensi kesejahteraan dan database kinerja pengawasan operasional SDP; • Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesejahteraan; • Melakukan Pengawasan terntegras Berlayar • Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat Kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BP2T dan Pelaksanaan SOP; • Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSPD di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas; • Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSPD dan Webinar terkait tata cara pemberian Sertifikasi Berlayar (SPB) kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas; • Menantau proses pengharmonisan yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diarahi oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/lembaga terkait sehingga peraturan yang berlaku dapat segera ditetapkan dan diundangkan; • Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/atas action dari masyarakat.	Dr. TSPD
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukumi/Ditertapkan	%	0,000	• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan • Workshop Peraturan Perundang-undangan • Pelaksanaan Adhokas dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukumi/Ditertapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324.000	100%	0,000	Rp	977.877.805	200,00%	23,56%	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan	Bagian Hukum dan Hukum, setidgen Hubdat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	• Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubdat • Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Proses Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubdat • Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zid di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Dengkrola Kebijakan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik • Evaluasi Kefembagan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215.000	100%	77,402	Rp	-	96,21%	0,00%	• Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya • Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan • Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron identifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain; • Belum optimalnya evaluasi terhadap kesuksesan organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja; • Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritis/dukasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas; • Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum menguruti tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan PWP, pengalihan pengalihan masyarakat, White-Blowing System dan kebijakan bentuk lain kepentingan • Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	• Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; • Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; • Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja; • Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; • Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Bagian SDM dan Umum, setidgen Hubdat



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM			TARGET BILAN-2		REALISASI KINERJA		REALISASI BILAN-2		% CAPAIAN BILAN-2	% CAPAIAN BILAN-2	EVALUASI		RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							Volume	%	Nilai	Volume	%	Volume	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP3 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN • Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidi Angkutan Jalan Perintis • Trayek ADAP yang diayahi • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan • Survey Usulan Trayek Baru Keperintisan Angkutan Jalan • Subsidi Perkotakan Bay The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional) Pusat + Balai • Terminal Buarig (Pembangunan + Operasional) • Fasilitas (Pusat + Balai) SUNGAI, DAMAU & PENERYEBANGAN • Pte. Pengerbangan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidi Angkutan Pengerbangan Perintis • Rehabilitasi Kapal Pengerbangan ke Boleang • Subsidi Ro-Ro Long Distance Ferry Patimbang - Banjarnasin dan Patimbang - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp	2.654.183.480,102	100%	0,957	Rp	250.377.611.019	101,16%	9,43%	• Dit. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan AKAP dan trayek angkutan ALBN. • Pengembangan trayek ALBN terpagang pada perjanjian kerjasama antar dua negara. • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berlatihan dengan Indonesia; • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas. • Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana lokasi yang diusulkan adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum saja, namun belum mengkomodifikasi daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). • Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti pegunungan atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai; • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diremajakan dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang dilalui. • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke layanan angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut; • Adanya resistensi dari angkutan umum yang diawaki angkutan antarmoda; • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda; • Tingginya harga tarif pesawat domestik menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan domestik dari luar provinsi; • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN. • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator; • Dit. Prasatana TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Pemungut Trip A yang	• Dit. Angkutan Jalan • Multi tahun anggaran 2022, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN; • Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan informasi pelayanan angkutan KSPN; • Melakukan pemantauan dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN. • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasional dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpagang. • Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis yang masuk dari daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. • Melakukan survey usulan trayek baru keperintisan angkutan jalan sebelum penetapan jaringan trayek keperintisan. • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdat No. KP-DKD 600 Tahun 2022, dan • Bagaimana dengan Badan Perencanaan, Setdipdan Hubdat terkait pengawanan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DAMAR. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masuk dari daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. • Dit. Prasatana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda. • Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional.	• Dit. AI • Dit. TSDP		
		RP5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	rasio	0,636	• Subsidi Perkotakan Bay The Service	Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	0,636	0,636	100%	Rp	535.934.071.000	100%	0,636	Rp	56.872.885.229	100,00%	10,61%	• Pelaksanaan konktivitas untuk membantu rencana pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan di suatu wilayah;			Dit. AI	
					• Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Bay The Service													• Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema bay the service;				
					• Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Tarif Layanan Bay The Service													• Mengupayakan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PMWP yang bersifat wajib;				
					• Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan													• Pencanangan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program bay the service dengan memperhatikan RPMN dan Restru;				
																		• Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan;				
																		• Sosialisai penyelenggaraan Program Bay the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;				
																		• Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program bay the service secara reguler;				
																		• Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Bay The Service;				
																		• Memerencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program bay the service.				
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp	133.773.000	100%	95,143	Rp	-	101,15%	0,00%	• Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan.			Bagian SDM dan Umum, Setdipdan Hubdat	
																		• Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik.				
																		• Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi 3A RM-IPK kepada seluruh petugas pelaksana SSM				
																		• Melakukan pendampingan pelaksanaan SSM secara bertahap				
																		• Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SSM				
																		• Tidak lanjut atau hasil evaluasi				
																		• Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SSM				
																		• Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi AR SIP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memproses pengajuan pelayanan;				
																		• Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masif terhadap pengguna layanan sehingga lebih dapat dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perantara Direktorat Transportasi SDP				
		RP6 On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemeriksaan kegiatan Incident/ Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyerbangan Lintas Antar Provinsi	On Time Performance (OTP) Transportasi SDP	83,513	83,513	100%	Rp	275.000.000	100%	83,533	Rp	84.323.718	100,02%	10,66%	• Pelaksanaan online ticketing angkutan penyerbangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyerbangan Merak, Pelabuhan Penyerbangan Bakauheni, Pelabuhan Penyerbangan Krakatau dan Pelabuhan Penyerbangan Gilimanu terkait belum diterapkan pada pelabuhan penyerbangan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyerbangan Secara Elektronik;	• Melaksanakan kegiatan Sosialisasi /Bimbingan Teknis SPM Angkutan Penyerbangan;			Dit. TSDP
					• Penyelesaian Pengawasan Kapas Angkutan Penyerbangan Baru													• Pelaksanaan online ticketing angkutan penyerbangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyerbangan Merak, Pelabuhan Penyerbangan Bakauheni, Pelabuhan Penyerbangan Krakatau dan Pelabuhan Penyerbangan Gilimanu terkait belum diterapkan pada pelabuhan penyerbangan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyerbangan Secara Elektronik;	• Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyerbangan dan ketepatan jadwal di lapangan.			
																		• Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;				
																		• Melakukan evaluasi atas pelaksanaan pola operasi dan ketepatan jadwal;				
																		• Dukungan sistem Digitalisasi Pengawasan Operasional untuk pengawasan operasional di lapangan.				
		RP7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotakan	%	33,655	• Subsidi Perkotakan Bay The Service	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkotakan	33,655	33,655	100%	Rp	535.934.071.000	100%	49,086	Rp	56.872.885.229	145,85%	10,61%	• Pemanfaatan teknologi ITS Bus Priority untuk memberikan prioritas bagi angkutan umum;	• Berkordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat dapat terwujud sinergitas terhadap strategi khususnya pada kawasan yang dilayahi oleh BTS agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan ketepatan jadwal di lapangan, misalnya dengan pelaksanaan manajemen angkot dan bus lainnya lalu lintas seperti pemberian kesempatan bagi kendaraan pribadi di suatu ruas jalan tertentu;			Dit. AI
					• Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonstruksi Duta Pembayaran Tarif Layanan Bay The Service													• Melakukan evaluasi secara periodik terhadap realisasi On Time performance;				
					• Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan													• Melakukan report evaluasi efektivitas pengelolaan manajemen dan mnyapa lalu lintas dan hal terkait lainnya				

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN BULAN 2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB					
												CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN								
3	SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	RP 1	rasio	0,008	• Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan • Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Pelajar Pemeriksa BP Ranzing Bangun Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Perusahaan Karsen/ Kendaraan Bermotor • Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lintasan Nalid dan Tahun Baru (Rampcheck) • Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang • Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum • Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) • Program Aksi Keselamatan Berkendara • Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan • Forum LLA Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000.000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	• Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 167 perusahaan yang memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.657 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting. • Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum. • Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keefektifan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah aksi cost bagi perusahaan itu sendiri. • Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas.	• Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum. • Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum. • Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK. • Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll). • Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan. • Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat. • Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik ASAP/Perhelata maupun Angkutan Barang Khusus (BB). • Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan). • Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum. • Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU. • Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum. • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan. • Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum ASAP/Perhelata maupun Angkutan Barang (BB). • Untuk mempermudah pendataan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan ditetapkannya dengan sistem informasi peraturan angkutan umum (e-PONAM)	Dir. Sarana TI
		RP 2	rasio	0,033	• Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengkalan Hukum Bidang TSPD • Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000.000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%	2,88%	• Sumber Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan marine inspektur yang diarahkan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LKADP, dll. • Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengkrola Transportasi Darat dan KSDP Danau Tobas. • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan. • Regulasi di bidang keselamatan TSPD yang sudah mengalami peningkatan pematian	• Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas keahlihandaran terkait dengan cara mengetahui prakiraan cuaca dan pengimplementasian terhadap penentuan SPN. • Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; • Berkoordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca; • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan Ramp Check dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; • Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas. • Melakukan pengaduan kapal patroli untuk pengawasan di lokasi daerah yang rawan kecelakaan dan meningkatkan koordinasi pantauan terhadap cuaca ekstrem; • Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas. • Pembinaan Barisan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas. • Penyusunan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan; • Penyusunan kebijakan terkait kompetensi keahlihandaran dan database kinerja pengawasan operasional SDP. • Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesejahteraan; • Melakukan Pengawasan terlibat berlayar • Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pembinaan SDM yang terkait seperti BP2TL dan Pelaksanaan SOP. • Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSPD di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas. • Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSPD dan Webinar terkait tata cara pemberian Sanksi Penyalahgunaan Berlayar (SPB) kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortortas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobas.	Dir. TSPD	
4	SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1	%	0,000	• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324.000	100%	0,000	Rp	977.877.805	200,00%	23,56%	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan	Bagian Hukum dan Humas, setidgen Hubdat	
5	SP5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	• Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubdat • Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Proses Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubdat • Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Dengkrola Kebijakan di Lingkungan Ditjen Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik • Evaluasi Kefektifan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215.000	100%	77,400	Rp	-	96,21%	0,00%	• Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya • Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan • Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/inkonflik identifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya didiseminasikan sehingga belum dapat diaplikasikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain. • Belum optimalnya evaluasi terhadap kesesuaian organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja. • Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritis/dukasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas. • Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum menguar tingkat efektifitas penanganan gratifikasi, penerapan PWP, pengalihan pengalihan masyarakat, White-Blowing System dan kebijakan benturan kepentingan • Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah meniadakan/hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	Bagian SDM dan Umum, setidgen Hubdat



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET BULAN 3				% CAPAIAN BULAN 3				EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ID7	ID8	ID9	ID10	ID11	ID12	ID13	ID14	ID15	ID16	ID17	ID18	ID19
1	SP1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Nasional	RP 1 Rasio Konektivitas Transportasi Darat	rasio	0,946	JALAN • Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Monitoring Angkutan Antarmoda untuk mendukung KSPN • Subsidi Angkutan Jalan Perintis • Trayek AKOP yang dilayani • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan • Survey Jalan Trayek Baru Keperintisan Angkutan Jalan • Subsidi Perawatan Bus The Service • Terminal Tipe A (Pembangunan + Operasional Terminal) Pusat + Balai • Terminal Batang (Pembangunan + Operasional) • Fasilitas (Pusat + Balai) SUNGAL DANAU & PENYEBERANGAN • Pel. Penyelenggaraan (Pembangunan Baru, Lanjutan dan Rehabilitasi) • Subsidi Angkutan Penyelenggaraan Perintis • Rehabilitasi Kapal Penyelenggaraan Re Boleing • Subsidi Re-Re Long Distance Ferry Patimban, Banjarmasin dan Patimban - Pontianak	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,946	0,946	100%	Rp 2.654.181.480.102	100%	0,957	Rp 250.377.613.019	101,85%	9,43%	• Di. Angkutan Jalan • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap trayek dan subsidi angkutan perintis, trayek angkutan AKOP dan trayek angkutan ALBN. • Pengembangan trayek ALBN terpangkas pada perjalanan kerjasama antara dua negara. • Kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia; • Jumlah operator yang mau melayani pada trayek ALBN masih terbatas. • Pelayanan trayek keperintisan angkutan jalan saat ini berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah dimana ideanya yang tersebut adalah daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum saja, namun belum mengkomodifikasi daerah IT (Terpadu, Terluas, Tertinggi). • Pelayanan keperintisan angkutan jalan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kondisi geografis (seperti topografi atau dataran tinggi) dan akses jalan yang belum memadai. • Kendaraan operasional angkutan jalan perintis sebagian besar sudah mencapai umur teknis sehingga perlu diimpor dan kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan akses jalan yang didatangi. • Terbatasnya aksesibilitas dan konektivitas antarmoda transportasi di beberapa wilayah KSPN, yang dapat menghambat aksesibilitas wisatawan menuju ke kawasan angkutan antarmoda KSPN atau destinasi wisata lainnya di daerah tersebut. • Adanya kecelakaan dari angkutan umum yang diawasi angkutan antarmoda; • Kurangnya sosialisasi dan promosi terhadap keberadaan angkutan antarmoda; • Tagginya biaya tiket pesawat domestik menyebabkan berkurangnya wisatawan domestik dari luar provinsi; • Kurangnya event yang diadakan di destinasi wisata tujuan layanan angkutan KSPN; • Kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh operator; • Di. Prasana TI • Masih adanya pembangunan dan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A yang	• Di. Angkutan Jalan • Mulai tahun anggaran 2022, anggaran penyelenggaraan angkutan antarmoda KSPN menjadi kewenangan BPTD di wilayah KSPN terkait, hal ini untuk peningkatan pelayanan angkutan antarmoda di wilayah KSPN. • Pemantauan teknologi digital dalam penyediaan informasi pelayanan angkutan KSPN; • Melakukan pemantauan dan evaluasi per trialuan terhadap trayek dan pelaksanaan angkutan antarmoda KSPN; • Menambah jumlah layanan angkutan KSPN di daerah yang memiliki potensi wisata yang besar untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut; • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasi dan pelayanan angkutan KSPN agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). • Mengoptimalkan digitalisasi trayek angkutan KSPN sehingga semua trayek dapat terpantau. • Pengaturan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan antarmoda berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan antarmoda dapat tercapai; • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. • Melakukan survey wisata dan trayek baru keperintisan angkutan jalan sebelum penentuan jaringan trayek keperintisan. • Melakukan Rapat Kerja Teknis dengan BPTD terkait pelaksanaan pemberian subsidi yang berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis sesuai dengan Keputusan Dirjen Hubdan No. KP DHO 630 Tahun 2022, dan • Berkolaborasi dengan Badan Pencekaman, Setengah Hubdan terkait pengawasan angkutan jalan perintis menggunakan GPS dan aplikasi MITRA DABAT. • Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. • Di. Prasana TI • Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; • Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai data prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;	• Di. AI • Di. PTI • Di. TSDP
		RP 5 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaan	rasio	0,636	• Subsidi Perawatan Bus The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonsiliasi Data Pembayaran Tarif Layanan Bus The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkeretaan	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaan	0,636	0,636	100%	Rp 535.934.071.000	100%	0,636	Rp 56.872.885.229	100,00%	10,61%	• Melakukan koordinasi untuk memahami rencana pengembangan angkutan umum massal perkeretaan berbasis jalan di suatu wilayah; • Melakukan review terhadap regulasi terkait pelaksanaan program pengembangan angkutan umum massal perkeretaan berbasis jalan dengan skema Buy the Service; • Mengaplikasikan usulan tarif layanan BTS masuk kedalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang jenis dan tarif PNBP yang bersifat wajib; • Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan lokasi yang akan dipilih untuk penerapan program buy the service dengan memperhatikan RPJMN dan Rencana; • Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan perkotaan; • Sosialisasi penyelenggaraan Program Buy the Service kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat; • Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program buy the service secara regulir; • Pengembangan dan peningkatan sistem IT pada layanan Bus The Service; • Merencanakan alternatif pembiayaan dari sumber pendanaan lain untuk pengembangan program buy the service.	Di. AI	
2	SP2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	RP 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	Nilai	94,057	Pembiinan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dirjen Hubdan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Darat	94,057	94,057	100%	Rp 133.773.000	100%	95,143	Rp -	101,15%	0,00%	• Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan jalan terkait standar pelayanan minimal angkutan jalan; • Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan pemilihan PO terbaik. • Mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi 3A NIM (PK) kepada seluruh petugas pelaksana SSM • Mengadakan pendampingan pelaksanaan SSM secara bertahap • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SSM • Tindak lanjut atas hasil evaluasi • Menyediakan fasilitas yang memadai untuk pengguna jasa yang tidak ada gadget untuk melakukan SSM • Melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan perbaikan pada aplikasi dan SOP sehingga lebih memudahkan pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan pelayanan yang terbaik • Melakukan perbaikan komunikasi terhadap pengguna jasa dan melakukan sosialisasi secara masal terhadap pengguna layanan sehingga ke depan dapat terwujud sinergitas terhadap layanan perjalan Onshore Transportasi Sop.	Bagian SSM dan Umum, Setengah Hubdan	
		RP 6 On Time Performance (OTP) Transportasi SGP	%	83,513	• Pengawasan Pelaksanaan dan Pemeriksaan kegiatan Insidentil Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyelenggaraan Lintas Antar Provinsi • Pendampingan Penyelenggaraan Kapal Angkutan Penyelenggaraan Baru	On Time Performance (OTP) Transportasi SGP	83,513	83,513	100%	Rp 275.000.000	100%	83,533	Rp 84.321.716	100,02%	30,66%	• Pelaksanaan online ticketing angkutan penyeberangan baru diterapkan pada Pelabuhan Penyelenggaraan Merah, Pelabuhan Penyelenggaraan Bakauheni, Pelabuhan Penyelenggaraan Kelapaung dan Pelabuhan Penyelenggaraan Gilimanuk tetapi belum diterapkan pada pelabuhan penyeberangan lain yang terdapat pada PM 19 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyelenggaraan Secara Elektronik; • Pada beberapa lintas terkendala pasang surut arus pelayaran sehingga membutuhkan waktu lebih ketika akan sandar; • Pada beberapa lintas kekurangan fasilitas sementara jumlah kapal yang banyak, sehingga harus menunggu giliran untuk sandar dan melakukan bongkar muat; • Adanya keterlambatan pelayaran yang disebabkan oleh kapal yang gagal sandar karena kondisi lintas atau cuaca	Di. TSDP	
		RP 7 On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaan	%	31,655	• Subsidi Perawatan Bus The Service • Fleet Management System operasional angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service • Kegiatan Sewa Perangkat Tap on Bus dan Jasa Settlement beserta Rekonsiliasi Data Pembayaran Tarif Layanan Bus The Service • Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan di Kawasan Perkeretaan	On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaan	31,655	31,655	100%	Rp 535.934.071.000	100%	49,086	Rp 56.872.885.229	145,85%	10,61%	• Adanya migrasi teknologi dari Teman Bus ke Mitra Darat memerlukan waktu penyelesaian konsep yang ada • Belum terdapatnya antara layanan angkutan perkotaan Buy The Service sebagai Trunk Line (Trayek Utama dengan Angkutan Pengumpul (Feeder) seperti angkutan lokal dan belum maksimalnya dukungan dari feeder sehingga dapat mempengaruhi waktu tempuh layanan BTS • Dinamika masyarakat di lapangan yang sering terjadi sehingga sering dilakukan pengalihan rute sementara	Di. AI	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	% CAPAIAN BULAN 1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB				
												CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN							
3	SP3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi	RP 1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	rasio	0,008	• Pembinaan Teknis Manajemen Batas Kecepatan • Pembinaan Teknis Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Pelajar Pemeriksa BP Ranzing Bangun Kendaraan Bermotor • Pembinaan Teknis Perusahaan Karsen/ Kendaraan Bermotor • Inspeksi Keselamatan Kapal Sarana Angkutan Lintasan Nalid dan Tahun Baru (Rampcheck) • Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Orang • Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum • Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan) • Program Aksi Keselamatan Berkendara • Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan • Pembinaan Teknis Penilai Dokumen SMK PAU (Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum) • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kampanye Keselamatan • Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan Harmonisasi RUNE	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi jalan per 10.000 keberangkatan	0,008	0,008	100%	Rp	6.200.000.000	100%	0	Rp	805.736.774	200,00%	13,00%	• Perusahaan angkutan umum yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) masih sangat sedikit, sampai Desember tahun 2023 sebanyak 167 perusahaan yang memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dari kurang lebih 31.657 Perusahaan Angkutan Umum (PAU), hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan sehingga kesadaran akan hal tersebut masih sangat rendah dan dianggap tidak penting; • Belum diterapkannya sanksi bagi perusahaan angkutan yang belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; • Belum satu tujuannya perusahaan angkutan umum dengan pemerintah akan pentingnya keselamatan, keselamatan merupakan investasi sedangkan perusahaan masih beranggapan bahwa keselamatan merupakan sebuah aksi cost bagi perusahaan itu sendiri; • Kurangnya kesadaran Perusahaan Angkutan Umum akan pentingnya Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan mengurangi angka kecelakaan dan fatalitas.	• Akan disempurnakan peraturan terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum (SMK) terkait dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam hal pembinaan keselamatan angkutan umum; • Akan diatur regulasi terkait dengan penyediaan fasilitas tempat istirahat pengemudi angkutan umum; • Akan diberikan reward kepada perusahaan angkutan umum yang sudah menerapkan SMK dan akan mendorong kepada perusahaan angkutan umum untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaannya dengan melakukan asistensi atau pendampingan dalam penerapan SMK; • Melakukan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan secara menyeluruh baik offline maupun online (melalui media elektronik, media sosial dll); • Menggandeng public figure untuk mengkampanyekan keselamatan jalan sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan jalan • Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat; • Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik ASAP/Perhelata maupun Angkutan Barang Khusus (BB); • Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikutsertakan 33 (tiga puluh tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan); • Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan umum; • Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU; • Melaksanakan Ramp Check Angkutan Umum; • Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Transportasi Jalan; • Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum ASAP/Perhelata maupun Angkutan Barang (BB); • Untuk mempermudah penyediaan dan pengawasan penerapan SMK pada perusahaan angkutan umum akan dibangun sistem informasi SMK pada perusahaan angkutan umum (e-SMK) yang nantinya akan ditetapkannya dengan sistem informasi peraturan angkutan umum (e-PONAM)	Dr. Sarana T?
		RP 2 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	rasio	0,033	• Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengkalan Hukum Bidang TSP • Monitoring dan Pemantauan Kecelakaan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Penyeberangan per 10.000 Pelayaran	0,033	0,033	100%	Rp	950.000.000	100%	0	Rp	27.350.000	200,00%	2,88%	• Sumber Daya Manusia yang berkompetensi mengalami peningkatan pada tahun 2024 seperti penambahan marine inspektur sungai danau dan penyeberangan, penambahan ahli ukur kapal, penambahan auditor keselamatan kapal, penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LKADP, dll; • Adanya bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang keselamatan sungai, danau dan penyeberangan kepada 33 Balai Pengkrola Transportasi Darat dan KSDP Danau Tobo; • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Inspeksi keselamatan Transportasi Penyeberangan (Rampcheck) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan; • Regulasi di bidang keselamatan TSP yang sudah mengalami peningkatan pematian	• Segera Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh syahbandar dan petugas kesejahteraan angkutan umum yang mengahiasi prakiraan cuaca dan pengingatmestasi terhadap peraturan SPB; • Menyediakan monitor cuaca untuk pemantauan data real time cuaca pada lintas penyeberangan; • Berkordinasi dengan BMKG terkait prakiraan cuaca; • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi inspeksi keselamatan transportasi Penyeberangan (Ramp Check) dan Monitoring secara berkala terhadap kelainan sarana, prasarana dan Operasional Penyeberangan); • Mengadakan Bimbingan Teknis di bidang keselamatan angkutan penyeberangan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobo; • Mengadakan sosialisasi keselamatan angkutan penyeberangan kepada para operator Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan serta 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobo; • Pembinaan Barisan Teknis Peningkatan keselamatan angkutan penyeberangan di 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobo; • Penunasan aturan Manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengawasan; • Penyusunan kebijakan terkait kompetensi kesejahteraan dan database kinerja pengawasan operasional SDP; • Melakukan koordinasi dan tata kelola bidang kesejahteraan; • Melakukan Pengawasan terntegras Berlayar • Peningkatan Kompetensi SDM dibidang transportasi SDP dengan Pemberian Diklat kompetensi seperti diklat Syahbandar, diklat Syahbandar Pembantu, Diklat Marine Inspector, yang bekerjasama dengan Diklat Pemberdayaan SDM yang terkait seperti BP2TL dan Pelaksanaan SOP; • Melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Tusi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSPD di Seluruh Indonesia Melalui Zoom dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor Kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobo; • Pemberian Webinar terkait tata cara pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran TSPD dan Webinar terkait tata cara pemberian Sanksi Penertutupan Berlayar (SPB) kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Balai Pengkrola Transportasi Darat dan 1 (Satu) Kantor kesejahteraan dan Ortotas Pelabuhan Penyeberangan (KSDPP) Danau Tobo; • Menambah timeline target penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyusunan berjalan secara waktu yang ditentukan. • Memantau proses pengharmonisasian yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diarahi oleh Kementerian/Lembaga/Direktorat terkait sehingga peraturan yang diujikan dapat segera ditetapkan dan diundangkan. • Apabila peraturan sudah diundangkan maka diharapkan segera mendapatkan tanggapan/das action dari masyarakat.	Dr. TSPD
4	SP4 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	RP 1 Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	%	0,000	• Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan • Workshop Peraturan Perundang-undangan • Pelaksanaan Adhokar dan Pertimbangan Hukum Bidang Perhubungan Darat	Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dihukarkan/Ditertapkan	0,000	0,000	100%	Rp	4.151.324.000	100%	0,000	Rp	977.877.805	200,00%	23,56%	• Melakukan evaluasi terhadap peraturan yang telah baru ditetapkan • Melakukan evaluasi terhadap sosialisasi dan uji publik yang telah dilakukan. • Melakukan sosialisasi terhadap operator langsung terkait peraturan yang baru ditetapkan		Bagian Hukum dan Humas, setidgen Hubdat
5	SP5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	RP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	80,500	• Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional di Lingkungan Ditjen Hubdat • Penyusunan, Revisi dan Evaluasi Proses Bisnis dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Ditjen Hubdat • Revisi dan Evaluasi SOP di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat • Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zid di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Dengkulat Kebijakan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Standar Pelayanan serta Kualitas Pelayanan Publik • Evaluasi Keterbacaan di Lingkungan Ditjen Hubdat • Pembinaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Hubdat	Indeks RB Kementerian Perhubungan	80,500	80,500	100%	Rp	883.215.000	100%	77,400	Rp	-	96,21%	0,00%	• Penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Eselon 1 sudah berjalan sesuai arahan Leading Sector, namun belum terinternalisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat unit kerja dibawahnya • Monitoring dan evaluasi rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja belum seluruhnya dilakukan • Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron identifikasi dan dipetakan dengan baik namun hasil identifikasi dan analisis tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga belum dapat dipastikan kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Perhubungan Darat harmonis dengan kebijakan lain; • Belum optimalnya evaluasi terhadap kesuksesan organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan mandat kepada unit kerja; • Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritis/dukasi serta penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang belum dilakukan secara menyeluruh serta pola rotasi dan mutasi yang dilakukan secara massal belum didasarkan pemetaan kompetensi yang jelas; • Monitoring dan evaluasi implementasi penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas masih belum mengukut tingkat efektifitas penguatan anti korupsi, penerapan PPP, pengalihan pengalihan masyarakat, White-Blowing System dan kebijakan bentuk lain kepentingan • Implementasi pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, hal ini dikarenakan dengan masih sedikitnya unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.	• Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; • Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih menyeluruh pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat; • Melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja secara langsung tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerjanya; • Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat; • Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	Bagian SDM dan Umum, setidgen Hubdat